

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.
- Anthony F. Susanto, *et. all, Panduan Penyusunan Penulisan Hukum (Tugas Akhir)*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, 2015.
- B. Sudarso. Dalam Djokoprakoso, *Peranan Pengawasan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Aksara Persada Indonesia, 1990.
- Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2001.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditia Bakti, Bandung, 2005.
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Chaerudin, *et. all, Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, 2009
- Ermansjah Djaya, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Hassan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, PT. Ichtiar Baru – Van Hoeve, Jakarta, 1990.
- Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Jeremy Pope, *Strategi Memberantantas Korupsi*, Transparency International Indonesia (The Coalition Against Corruption), Jakarta, 2003.
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006.

- John Emerich Edward Dalberg Alton dalam Ilham Gunawan, *Postur Korupsi di Indonesia Tinjauan Yuridis, Sosiologis, Budaya dan Politik*, Angkasa, Bandung, 1990.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami Untuk Membasmi; Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2006.
- M. Yusuf Jhon dan Dwi Setiawan, *Kiat Memahami Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009.
- Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi & Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*. Referensi, Jakarta, 2012.
- \_\_\_\_\_, *Korupsi & Strategi Nasional (Pencegahan Serta Pemberantasannya)*. Referensi, Jakarta, 2013
- Masri Maris, *Penuntutan Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah*, Yayasan Obor, Jakarta, 2005.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.
- Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Soedjono Dirdjosiswoyo, *Fungsi Perundang-Undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Suhendar, *Konsep Kerugian Keuangan Negara*, Setara Press, Malang, 2015.
- Suryadi Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 1994.
- Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid I*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2004.

Syamsul Anwar, *Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah*, Pusat studi Agama dan Peradaban (PSAP), Jakarta, 2006.

Syed Hussein Alatas dalam Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Bandung, 2001.

Untung S. Rajab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (berdasarkan UUD 1945)*, CV. Utomo, Bandung, 2003.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 143/PMK.02/2015, Pasal 10, ayat (2). Point b *Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran*

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana*

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang *Penyelenggaraan Negara yang Bebas Kolusi Korupsi dan Nepotisme*.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang *Perbendaharaan Negara*.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang *Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang *Kejaksaan Republik Indonesia*.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang *Badan Pemeriksa Keuangan*.

Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 tentang *Standar Pemeriksaan BPK*.

## **Sumber Lain**

<http://www.ti.or.id/index.php/publication/2016/01/27/corruption-perceptions-index-2015>. Diakses 14 Februari 2016, Pukul 17.55 WIB.

<http://www.pengertianpakar.com/2015/02/pengertian-dan-ciri-korupsi-menurut.html>. Diakses 14 Februari 2016, Pukul 18.40 WIB.

<http://rodial.blogspot.co.id/2014/02/makalah-tentang-badan-pemeriksa-keuangan.html>. Diakses tanggal 17 Maret 2016. Pukul 20.10 WIB.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pengguna\\_anggaran](https://id.wikipedia.org/wiki/Pengguna_anggaran). Diakses pada tanggal 17 Maret 2016, Pukul 21.30 WIB.

<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/1011.i> Diakses pada tanggal 29 Mei 2016, Pukul 08.35 WIB

Wawancara dengan Aep Saepuloh, S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum Kajari Kota Cimahi. Pada tanggal 1 Agustus 2016, Pukul 18.35 WIB.